

Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato

Purnama Sari^{1*}, Syamsuddin²

^{1,2}Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sejauh manakah pengimplementasian SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Keuangan dipemerintahan kabupaten Pohuwato sehingga bisa mendapatkan laporan keuangan serta informasi keuangan yang akurat. Metode penelitian yang di gunakan menggunakan pendekatan Penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Secara umum pegawai pada BKD Kabupaten Pohuwato telah mengetahui makna SIMDA keuangan, terlihat dari pemahaman mereka mengenai pengertian, manfaat dan tujuan serta input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan dari hasil pengolahannya. Faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh BKD Kabupaten Pohuwato dalam penerapan SIMDA Keuangan secara optimal, antara lain: Komunikasi atau sosialisasi yang aktif mengenai tujuan penerapan atau manfaat dari penerapan sistem tersebut, Sumber Daya Manusia yang handal/memenuhi baik dalam jumlah maupun kapasitasnya, Adanya sikap implementor yang menerima/setuju atas pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan serta dukungan dari kepala kantor/pemimpin. Terdapat pengawasan yang baik terhadap SIMDA sehingga bentuk kegagalan yang disebabkan oleh sistem dapat diantisipasi. Sedangkan Kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan sudah cukup baik, antara lain: Ketepatan Waktu, Andal dan Relevan.

Kata Kunci: *Sistem Informasi Manajemen Daerah.*

Copyright (c) 2022 Yuli Indri Sari

✉ Corresponding author :

Email : yulind@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam hal mempertanggungjawabkan sebuah keuangan, Pemerintah daerah mempunyai kewajiban didalam pemanfaatan sebuah tehnologi informasi supaya bisa memudahkan proses didalam mengelola data keuangan (Dewi & Mariska, 2018). Agar bisa mengelola keuangan dengan efektif serta efisien maka diperlukan sebuah sistem informasi terintegrasi yang bisa andalkan, cepat serta akurat sehingga sebuah sistem bisa di integrasikan dengan menyeluruh serta bisa menghasilkan informasi yang handal serta relevan (Pasi dkk, 2017). Hal tersebut disebabkan oleh meningkatkan jumlah volume Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) dari tahun ketahun (Muslimin & Sulfianty, 2022). Didalam meningkatkan volume kuantitas

transaksi wajib di ikuti dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan pemerintahan (Karim dkk, 2021). Oleh karena itu, pemerintahan daerah memiliki kewajiban didalam melakukan pengembangan serta pengembangan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah (Syamsuddin dkk, 2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 mengenai sistem informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti Peraturan pemerintahan No. 11 tahun 2001 mengenai informasi keuangan daerah yang berisi didalam menindak lanjuti terlaksananya proses pembangunan yang searah dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (Sahabuddin dkk, 2021). Pemerintah daerah maupun pusat yang memiliki kewajiban didalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta penyaluran informasi keuangan bagi pelayanan publik (Karim dkk, 2022). Pemanfaatan ehnologi informasi direalisasikan didalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang sering disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. SIMDA ini dibuatoleh BPKP (badan pengawas keuangan serta pembangunan) yang merupakan sebuah sistem informasi yang dibangun, di kembangkan serta dipergunakan didalam melaksanakan proses penyusunan APBD dengan basis kinerja (Darea & Elim, 2015).

Penggunaan tehnologi informasi bukan lagi sebuah kewenangan melainkan sebuah keharusan (Syukur dkk, 2021). Keefisienan, keefektifan serta produktifitas kerja diorganisasi ataupun perusahaan sebagai keseluruhan bisa dikembangkan melalui penggunaan tehnologi ini. BPKP sesuai dengan fungsi sebagai auditor internal serta sebagai pengemban amanat (Sunato, 2009). Pembina pelaksanana sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 mengembangkan SIMDA Keuangan berdasarkan terhadap ketentuan Undang-Undang. Praktek didalam mengelola keuangan pemerintahan daerah sesuai dengan Permendagri mengenai pedoman pengelolaan keuangan pemerintahan daerah (Hartono, 2013). Pelaksanaan amanat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2005 didalam pemanfaatan sebuah tehnologi informasi lewat pengimplementasian SIMDA Keuangan, Pemerintahan Kabupaten Pohuwato sudah berhasil didala mengimplementasikan SIMDA Keuangan dengan menyeluruh dengan tujuan untuk memperoleh hasil laporan keuangan (Ridwan, 2009). Secara menyeluruh informasi keuangan dengan tepat waktu, lengkap, akurat, serta bisa di andalkan sesuai ketentuan yang berlaku dan mendorong terlaksananya pemerintahan yang baik serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan menyiapkan sistem pengelolaan keuangan dengan basis tehnologi informasi pada khususnya (Muslimin & Sulfianty, 2020).

Suatu program aplikasi computer yang sudah terintegrasi serta bisa membandu didalam sebuah proses administrasi pemerintahan daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai pada tingkatan kecamatan serta kelurahan merupakan sebuah aplikasi sistem informasi manajemen. Sampai pada bulan Januari 2016 program aplikasi SIMDA sudah diterapkan kepada 425 Pemerintah daerah dari 542 Pemda yang ada ataupun sebanyak 78,41%, yang terdiri dari 4 jenis program aplikasi, yakni; SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Gaji, dan SIMDA Pendapatan melalui sistem database terintegrasi, supaya outputnya bisa digunakan bagi pimpinan daerah didalam membantu proses didalam mengambil keputusan. Selain itu, pihak legislatif bisa memanfaatkannya didalam melaksanakan monitoring terhadap kinerja pemerintahan daerah. SIMDA adalah sebuah upaya didalam hal memenuhi

kebutuhan informasi dengan cepat, tepat, lengkap, akurat serta terpadu didalam menunjang proses administrasi dipemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta memfalisasi partisipasi serta dialog public didalam merumuskan kebijakan.

Output yang yang diperoleh dari SIMDA keuangan yaitu penganggaran (rencana kerja anggaran, dokumen pelaksana anggaran, PAPBD serta rancangan penjabarannya, APBD serta penjabaran APBD serta perubahannya dan surat penyediaan dana), penatausahaan (surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, surat perintah pencairan dana, surat tanda setoran, register dan surat pengendalian lainnya), dan akuntansi serta pelaporan (jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, serta perda pertanggungjawaban serta penjelasannya (Sugiyantar dkk, 2018). Program aplikasi SIMDA keuangan didukung oleh buku manual sistem serta prosedur penganggaran, buku manual sistem penatausahaan, buku manual sistem serta prosedur akuntansi dan pelaporan serta buku pedoman pengoperasian aplikasi SIMDA keuangan. Program aplikasi SIMDA Keuangan memiliki fungsi yaitu membantu pemerintahan daerah didalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, menyusun laporan keuangan denganeffisien serta akurat, menyimpan data keuangan untuk kebutuhan manajemen lain, Menyiapkan informasi yang akurat serta efisien dan efektif yang bisa dipergunakan oleh pemakai laporan Dan memudahkan proses audit untuk seorang auditor dengan melakukan perubahan tata cara audit manual menjadi elektronik data processing audit.

Kerangka pikir disalah satu pemerintahan dari yang sudah menerapkan teknologi informasi melalui pengimplementasian SIMDA keuangan yaitu dipemerintahan kabupaten pohuwato. Penelitian ini dilaksanakan didalam mendapatkan gambaran tentang pengimplementasian SIMDA keuangan dikabupaten Pohuwato dengan model kualitatif dengan pendekatan fenomenolog. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan memakai pendekatan kualitatif sehingga dilaksankannya kegiatan observasi langsung didalam memperoleh kondisi alamiah dilapangan (Yanto & Afkir, 2020). Data wawancara serta dokumentasi hasil penelitian dilaksanakan analisis deskriptif yang terdiri dari organisasi data, pemahaman didalam mendapatkan tema serta interpretasi yang berkaitan dengan teori ataupun hasil dipenelitian sebelumnya. Pemerintahan daerah kabupaten Pohuwato mengimplementasikan SIMDA keuangan (Sultan, 2022). Deskriptif tentang SIMDA keuangan didalam memproses pengolahan transaksi akuntansi sampai dengan menyusun laporan keuangan dipemerintahan daerah hasil penelitian.

METHODOLOGI

Penelitian ini dilakukan pada BKD Kabupaten Pohuwato yang merupakan salah satu OPD yang sudah mengimplementasikan SIMDA di Kabupaten Pohuwato dan penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari 2022 sampai Maret 2022. Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato dan dokumen (gambaran umum, struktur organisasi, serta *job description*). Sumber data utama didalam penelitian kualitatif ini yaitu kata-kata serta tindakan. Selebihnya merupakan data tambahan berupa arsip data serta lain sebagainya. Sumber data yang dipakai dipenelitian ini yaitu:

- 1) Data Primer, merupakan sebuah data yang didapatkan melalui sebuah wawancara langsung terhadap informan kunci.

- 2) Data Sekunder, merupakan data yang didapatkan melalui suatu dokumen yang memiliki kaitan dengan pembahasan, literature, dan sumber lain yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.

Proses wawancara dilakukan secara langsung serta mendalam terhadap pihak yang memiliki keterlibatan serta keterkaitan langsung didalam memperoleh penjelasan terhadap kondisi serta keadaan yang sebetulnya. Yang menjadi informan didalam penelitian ini yaitu orang yang dianggap mempunyai informan kunci yang diperlukan di wilayah penelitian. Jika key informan didalam peneliti ini adalah penanggung jawab sistem informasi manajemen daerah keuangan dibagian penata usahaan, penanggungjawab SIMDA keuangan dibidang keuangan, penanggung jawab SIMDA keuangan dibidang akuntansi & pelaporan serta Faktor lain yang mempunyai wewenang didalam pengoperasian SIMDA Keuangan.

Observasi dipakai didalam melakukan pengamatan serta pencatatan gejala yang muncul terhadap objek penelitian terhadap situasi yang alami ataupun yang sebetulnya sedang terjadi berupa keadaan SDM, keadaan sarana serta prasarana yang tersedia, proses akuntansi dan hambatan didalam melakukan pengimplementasian SIMDA keuangan serta keadaan lainnya yang bisa mendukung hasil penelitian. Hal tersebut dimaksud untuk memperoleh data yang lebih mendekati terhadap kebenaran yaitu melalui perbandingan hasil wawancara dengan situasi yang sesungguhnya. Penelusuran data melalui dokumen pendukung data penelitian yang tidak bisa didapatkan didalam kegiatan observasi serta wawancara. Materi yang dibutuhkan didalam penelitian pengimplementasian SIMDA keuangan dibadan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato adalah:

- 1) Data mengenai profil Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato mencakup: visi, misi, struktur organisasi, sumber daya manusia, serta gambaran penerapan SIMDA keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.
- 2) Data informasi laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SIMDA keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Gunawan, 2013). Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Analisis data merupakan langkah terakhir dalam penelitian sebelum melakukan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018). Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga lebih mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Didalam penelitian ini memakai analisis data deskriptif untuk menjelaskan pemahaman secara mendalam melalui pengimplementasian SIMDA. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang digunakan didalam menganalisis data pada penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Data didapatkan dari proses wawancara, observasi serta dokumentasi di organisir kemiripan serta perbedaan sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- 2) Data yang telah di tentukan temanya.
- 3) Mencari keterkaitan antar tema.
- 4) Interpestasi mengenai seluruh penemuan yang sesai dengan kaitannya dengan unsur tema dengan memakai teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Pegawai tentang SIMDA Keuangan

Ciri utama SIMDA Keuangan adalah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan data keuangan pada pemerintah daerah. Secara umum, pegawai yang terkait dengan proses pengoperasian SIMDA Keuangan pada BKD Kabupaten Pohuwato telah mengerti/paham tentang makna dan tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan. Hal ini terbukti dari wawancara dengan beberapa staf di BKD Kabupaten Pohuwato, diantaranya salah seorang staf penatausahaan yang bertugas dalam pengoperasian SIMDA Keuangan yang mengatakan “yang jelas SIMDA itu sebuah aplikasi komputer untuk mengelolah transaksi-transaksi keuangan daerah”. Hal senada juga diungkapkan oleh seorang staf bagian anggaran yang mengatakan bahwa, “SIMDA itu adalah sebuah sistem yang bekerja secara terintegritas yang dirancang oleh BKD untuk mengolah data keuangan pemerintah daerah”. Dalam wawancara dengan salah seorang staf bagian akuntansi, staf tersebut mengungkapkan bahwa: “sebenarnya penerapannya tidak dipaksakan, ini hanya salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk diterapkan pada semua SKPD atau instansi pemerintah di Pemkab ini”.

Pendapat beberapa pegawai tersebut di atas telah sesuai dengan pengertian SIMDA Keuangan secara umum menurut (BPKP, 2007) yaitu sebuah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan laporan keuangan pemerintah daerah, sebuah implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan, konsistensi atau keseragaman dari ukuran- ukuran dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Berikut ini hasil wawancara mengenai pemahaman pegawai tentang tujuan dari penerapan SIMDA keuangan pada BKD Kabupaten Pohuwato.

Salah seorang staf bagian anggaran mengungkapkan bahwa: “sebelum menerapkan sebuah kebijakan, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu manfaat dan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Demikian halnya dengan penerapan SIMDA ini, singkatnya salah satu tujuan dari penerapan sistem ini yaitu untuk memperbaiki sistem pengolahan data keuangan pemerintah dengan mengadakan transformasi dari sistem manual ke komputerisasi”. Salah seorang bagian penatausahaan juga mengungkapkan bahwa: “tujuan diterapkannya SIMDA keuangan ini untuk membantu pengolahan data keuangan, mempercepat proses penyusunan laporan keuangan. Proses penyajian laporan keuangan menjadi lebih mudah dengan adanya sistem ini. Hal yang senada juga diungkapkan oleh salah seorang pegawai bagian anggaran yang juga memiliki wewenang untuk mengoperasikan SIMDA keuangan. Dalam wawancara dengan staf tersebut, beliau mengungkapkan, “yang saya pahami dan sesuai dengan yang saya kerjakan, SIMDA Keuangan itu mempermudah proses penyajian RKA, DPA, dan SPD, data tinggal diinput dan otomatis akan terolah sendiri”.

Setiap pegawai yang memiliki kewajiban dalam pembuatan laporan keuangan merasakan manfaat yang sama dari penerapan SIMDA keuangan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Pohuwato. Manfaat penerapan SIMDA ini tergambar dari hasil wawancara kepada beberapa pegawai BKD kabupaten Pohuwato. Menunjukkan bahwa SIMDA keuangan mempermudah dalam proses

pengolahan data keuangan, dimana pegawai hanya bertugas untuk menginput data dan kemudian terproses secara otomatis. Hal ini membuat proses pelaporan keuangan menjadi lebih mudah serta dapat mengefektifkan waktu penyusunan laporan keuangan. Selain pemahaman pegawai mengenai manfaat dan tujuan dari penerapannya, untuk menambah gambaran pemahaman pegawai mengenai SIMDA keuangan, pegawai juga perlu memahami setiap input yang akan diolah atau diproses dengan menggunakan SIMDA keuangan serta output yang akan dihasilkan dari proses pengolahannya. Adapun output yang dimaksud dari proses pengolahan data pada SIMDA Keuangan merupakan elemen-elemen laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diatur dalam permendagri 13 tahun 2006. Ungkapan hasil wawancara penelitian membuktikan bahwa pegawai BKD Kabupaten Pohuwato telah memahami proses pelaksanaan SIMDA keuangan yang berkaitan dengan input dan output data yang dihasilkan. Hal tersebut menambah pengetahuan dan pemahaman pegawai mengenai makna dan proses pelaksanaan SIMDA keuangan secara umum. SIMDA keuangan bekerja secara terintegrasi yang terbagi ke dalam 3 bagian yaitu.

1. Bagian anggaran
2. Bagian penatausahaan
3. Akuntansi dan pelaporan

Setiap bagian bertanggungjawab atas tugasnya masing-masing, bagian anggaran bertanggungjawab untuk menyusun rencana kerja anggaran (RKA), dokumen pelaksana anggaran (DPA), serta surat penyedia dana (SPD). Bagian penatausahaan bertanggungjawab untuk menyusun surat perintah pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM), surat perintah pencairan dana (SP2D) serta surat surat lainnya, sedangkan bagian akuntansi bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan. Laporan-laporan tersebut diproses secara otomatis dengan menggunakan SIMDA keuangan. Setiap pegawai yang bertanggungjawab menyusun laporan hanya bertugas menginput data ke dalam sistem dan secara otomatis terolah sendiri sampai menghasilkan output yang diinginkan. Hal tersebut memudahkan tanggungjawab yang harus dikerjakan oleh para pegawai. Secara umum pegawai pada BKD Kabupaten Pohuwato telah mengetahui makna SIMDA keuangan, terlihat dari pemahaman mereka mengenai pengertian, manfaat dan tujuan serta input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan dari hasil pengolahannya. Hal tersebut tentunya memperkuat pemahaman mereka dalam memanfaatkan penerapan SIMDA keuangan.

B. Faktor-faktor Pendukung yang Dimiliki BPKD Gowa dalam Penerapan SIMDA Keuangan

Penerapan SIMDA Keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato khususnya BKD Kabupaten Pohuwato tentunya tidak lepas dari prakondisi yang menjadi faktor pendukungnya. Dari hasil penelitian, berbagai faktor pendukung yang dimiliki untuk menerapkan SIMDA Keuangan pada BKD Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut.

1. Komunikasi

Penerapan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan penerapan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan, dalam hal ini kebijakan penerapan SIMDA Keuangan. Kejelasan ukuran dan tujuan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan pelaksana. Komunikasi

dalam bentuk sosialisasi pada BKD Kabupaten Pohuwato mengenai penerapan SIMDA Keuangan cukup baik.

2. Sumber Daya Manusia

Faktor penting lain yang merupakan penentu keberhasilan penerapan suatu kebijakan yaitu upaya pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu berbagai upaya telah ditempuh oleh BKD Kabupaten Pohuwato guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan SDM yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan SIMDA Keuangan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diketahui bahwa ternyata dalam penerapan SIMDA Keuangan pada BKD Kabupaten Pohuwato didukung oleh beberapa faktor dalam hal SDM nya, yaitu:

- a. Sumber daya manusia yang memang handal/memenuhi baik dalam jumlah maupun kapasitasnya.
- b. Untuk penerapan SIMDA Keuangan, pegawai dibekali dengan pelatihan rutin, seperti pelatihan SIMDA, diklat dan sebagainya.
- c. Adanya kesadaran para pegawai untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan curah pikir/diskusi yang lebih khusus tentang penerapan aplikasi SIMDA keuangan antar pegawai serta kordinasi yang baik.

C. Disposisi/Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses penerapan akan mengalami banyak masalah dalam hal disposisi/sikap ini, ditemukan adanya respon yang baik dari para implementor karena mereka sadar bahwa penerapan SIMDA Keuangan akan membawa dampak yang baik sehingga mereka setuju untuk menerapkan SIMDA Keuangan. Tentunya penerapan SIMDA Keuangan ini berjalan lebih baik karena didukung oleh peraturan dan pedoman khusus yang memadai. Hal ini dinyatakan oleh staf bagian anggaran BKD Kabupaten Pohuwato, "Ya setuju saja karena memang penerapannya berdasarkan peraturan khusus yaitu permendagri 13 dan pedoman yang mendukung penerapannya". Wawancara di atas menunjukkan bahwa respon pegawai atas penerapan SIMDA Keuangan di BKD Kabupaten Pohuwato cukup baik sehingga penerapannya dapat terlaksana dengan baik dan dilaksanakan dengan senang hati oleh setiap pegawai.

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang. Unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam penerapan kebijakan salah satunya adalah tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan sub unit dan proses pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan pada BKD Kabupaten Pohuwato sudah cukup baik. Hal tersebut terungkap dalam wawancara dengan Kepala Bagian akuntansi dan pelaporan. Beliau mengatakan bahwa:

“di BKD Kabupaten Pohuwato terdapat operator SIMDA bertugas untuk mengawasi jalannya penerapan sistem itu. Sejauh ini sistem tidak pernah bermasalah, karena sebelum terjadi kita telah melakukan antisipasi terlebih dahulu, contohnya kita ada server cadangan, jadi jika sistem mengalami masalah, server cadangan dapat digunakan. OPD lainpun tidak pernah mengeluh dengan laporan-laporan kita. Itulah gunanya Tim administrator sebagai pengawas sekaligus pegawai di Kantor ini”.

E. Kualitas Informasi yang Dihasilkan SIMDA Keuangan

Bagaimanapun idealnya sebuah aransemen kebijakan, jika output yang dihasilkan dari sebuah penerapan tidak sesuai dengan manfaat yang diharapkan maka kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik dan dapat dianggap gagal. Dari hasil penelitian pada BKD Kabupaten Pohuwato, ditemukan berbagai beberapa karakteristik kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan. Dalam wawancara dengan Kepala Bagian akuntansi dan pelaporan. Beliau mengatakan bahwa:

1. Ketepatan waktu
2. Andal
3. Relevan

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan definisi kualitas informasi dari ketiga karakteristik diatas yang berarti tepat waktu, saling berhubungan, dan dapat diandalkan. Ungkapan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa tingkat kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan pada BKD Kabupaten Pohuwato sudah cukup baik. Tertundanya penyajian laporan keuangan yang diakibatkan oleh kegagalan sistem hampir tidak pernah terjadi, justru pegawai menjadi termotivasi dengan adanya sistem ini karena sangat membantu dalam proses penyajian laporan keuangan. Setiap bagian dalam sistem bekerja saling secara integritas dan saling berhubungan satu sama lain, setiap transaksi dikelompokkan secara otomatis menurut jenisnya masing-masing oleh sistem, sehingga pegawai hanya bertugas untuk menginput data ke dalam sistem. Setiap laporan yang ditransfer ke OPD lain tidak pernah mengalami keluhan semenjak diterapkannya sistem ini, hal ini membuktikan bahwa sistem ini telah bekerja dengan baik.

F. Manfaat Penerapan SIMDA Keuangan

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA Keuangan daerah terintegrasi (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut :

1. *Database* terpadu, tidak perlu input berulang-ulang yang sama;
2. Data yang sama akan tercetak dan recek secara otomatis (validasi data terjamin); dan
3. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana;
4. *Output* dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan
5. *Output* dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/kebijakan.

SIMPULAN

Secara umum pegawai pada BKD Kabupaten Pohuwato telah mengetahui makna SIMDA keuangan, terlihat dari pemahaman mereka mengenai pengertian, manfaat dan tujuan serta input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan dari hasil

pengolahannya. Faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh BKD Kabupaten Pohuwato dalam penerapan SIMDA Keuangan secara optimal, antara lain:

- a. Komunikasi atau sosialisasi yang aktif mengenai tujuan penerapan atau manfaat dari penerapan sistem tersebut.
- b. Sumber Daya Manusia yang handal/memenuhi baik dalam jumlah maupun kapasitasnya
- c. Adanya sikap implementor yang menerima/setuju atas pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan serta dukungan dari kepala kantor/pemimpin.
- d. Terdapat pengawasan yang baik terhadap SIMDA sehingga bentuk kegagalan yang disebabkan oleh sistem dapat diantisipasi.
- e. Kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan sudah cukup baik.

Dalam upaya penerapan SIMDA Keuangan pada organisasi/instansi lain yang tertarik untuk menerapkan SIMDA Keuangan sebagai sistem komputerisasi pengolahan data keuangannya yaitu perlu pengembangan atas pemahaman pegawai tentang maksud dan tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan serta memahami faktor-faktor pendukung apa yang perlu dimiliki oleh setiap instansi untuk dapat menerapkan SIMDA Keuangan baik dalam hal komunikasi, pengembangan sumber daya manusia dan yang paling penting adalah sikap dari para implementor serta komitmen pemimpin dan pengawasan. Hal ini yang turut mendukung penerapan SIMDA Keuangan sehingga mampu menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas, laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu serta dapat diandalkan.

Referensi :

- Darea, D. W., & Elim, I. (2015). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(2).
- Dewi, N. C., & MARISKA, S. (2018). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintahan Kota Pariaman. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 63-70.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartono, Bambang. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Karim, A., Musa, C. I., Sahabuddin, R., & Azis, M. (2021). The Increase of Rural Economy at Baraka Sub-District through Village Funds. *The Winners*, 22(1), 89-95. <https://doi.org/10.21512/tw.v22i1.7013>
- Karim, A., Syamsuddin, I., Jumarding, A., & Amrullah, A. (2022). The Effect of Gender Independence and Leadership Style on Audit Quality in Makassar Public Accounting Offices. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(7), 114-126. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i7.341>
- Muslimin, K., & Sulfianty, S. (2020). *Tax Sanctions and Tax Office Services Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha di Kabupaten Pohuwato*. *Al-Buhuts*, 16(2), 52-70.
- Muslimin, K., & Sulfianty, S. (2022). Pemeriksaan Manajemen Terhadap Fungsi Keuangan Pada PDAM Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(1), 130-136.

- Pasi, N., Kadir, A., & Isnaini, I. (2017). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 7(1), 49-63.
- PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti dari PP Nomor 11 Tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah.
- Ridwan. (2009). *Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu*. Bandung. Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran.
- Sahabuddin, D. R., Idrus, D. M. I., & Abdul Karim, S. E. (2021). *Pengantar Statistika*. Lyon Pustaka. Makassar. Indonesia.
- Sugiyantari, D., Titisari, P., & Sumani, S. (2018). Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Cloud Pada Pemerintah Kabupaten Jember. *BISMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 12(1), 106-118.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sultan, M. (2022). Kolaborasi Stakeholder's Dalam Penyelenggaraan Corporate University Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 3(2), 81-94.
- Sutanto, Azhar. (2009). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Linggar Jaya.
- Syamsuddin, I., Muhammad, P. N., & Karim, A. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 170-177.
- Syukur, A., Novianti, A. S., & Karim, A. (2021). Financial Ratio Analysis of Pt. Semen Tonasa before and After Joining the Semen Indonesia Group. *International Journal of Engineering Technology Research & Management*, 5(1), 11-17.
- Yanto, E., & Afkir, M. (2020). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli). *Indonesian Journal of Strategic Management*, 3(1).